**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur *Review***

Literatur *review* merupakan kerangka yang disusun oleh penulis untuk mengklasifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. Tujuan dari literatur *review* itu sendiri adalah untuk mendapatkan pemahaman terkait permasalahan yang dikaji yakni terkait kerjasama investasi Indonesia – Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia yang kemudian akan diolah untuk memecahkan masalah yang diteliti yang disesuaikan dengan kerangka berpikir ilmiah. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menghimpun informasi dari tulisan terdahulu yang relavan dengan topik yang diantaranya bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, *press release*, skripsi, dan berita-berita resmi.

Adapun beberapa **literatur *review* pokok** penulis diantaranya sebagai berikut:

1. “Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia-Tiongkok” Literatur *review* pertama adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yamin dan Sheilla Windymadaksa**,** Universitas Jenderal Soedirman. Di dalam jurnal ini dijelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal pemerintahannya diakhir 2014, langsung menjalin kedekatan dengan berbagai negara. Ini terlihat pada pertemuan bilateral di beberapa agenda Internasional dan kunjungan langsung kenegaraan.

Dari banyak negara tersebut, kedekatan yang cukup terlihat adalah dengan pemerintahan Tiongkok, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Kemesraan ini terbaca ketika kehadiran Jokowi dalam agenda APEC di Beijing. Jokowi mendapatkan panggung untuk memperkenalkan Indonesia dari segala sisi. pada era pemerintahan Joko Widodo Indonesia mulai mengejar ketertinggalan pembangunan khususnya di sektor infrastruktur. Alasan logis kenapa Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastrukur sebagai alat utama pertumbuhan ekonomi adalah sejalan dengan penelitian Prof Demurger, seorang Profesor ekonomi pembangunan dari universitas Auvergne Perancis di tahun 2000, yang menyatakan bahwa infrastruktur adalah faktor utama sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.[[1]](#footnote-1)

Poin utama yang menjadi perhatian utama dalam menyusun konsep pembangunan era pemerintahan Joko Widodo adalah kecepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan. Hal ini menjadi rasional mengingat posisi Indonesia dalam kualitas infrastruktur masih menempati peringkat 92 dari 144 negara dengan poin 3,7 berdasarkan hasil kajian *World Economic Forum* di tahun 2014, secara statistik Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Filipina (98), namun jauh dibawah Singapura (2), Korea Selatan (22), Tiongkok (69), India (87). Kualitas yang buruk dari infrastruktur Indonesia adalah salah satu penyebab biaya logistik yang tinggi dan tidak kompetitif, hal tersebut dilihat dari indeks performa logistik Indonesia pada kisaran 3,08 pada tahun 2014.[[2]](#footnote-2)

Perbedaan antara jurnal yang peneliti *review* dengan penelitian yang dibahas yaitu pada jurnal ini membahas tentang perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Dimana kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok dirasakan semakin erat dan intens pada masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014 dapat dilihat pada banyaknya kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara terutama pembangunan KCIC Jakarta-Bandung merupakan proyek yang mendapat perhatian lebih oleh Indonesia-Tiongkok dimana pembangunan ini diidentikkan sebagai mercusuar dari terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dengan Tiongkok. Persamaannya yaitu pemerintah Indonesia berfokus pada perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Indonesia maka dari itu kedua negara ini bekerjasama utuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung.

1. “Kebijakan Ekonomi dan Politik Indonesia Memilih Bekerjasama Dengan Tiongkok Dari Pada Jepang Dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahun 2015” Literatur *review* kedua adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Engra Rahmadoni, Universitas Riau. Di dalam jurnal ini dijelaskan Indonesia yang saat ini berada di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo berdasarkan dengan program Nawa Cita dan Tri Sakti menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu poros utama. Keberadaan infrastruktur transportasi dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Salah satu infrastruktur yang ingin dibangun oleh Jokowi adalah pengadaan proyek kereta cepat. Presiden Jokowi mengungkapkan soal rencananya yang ingin memboyong kereta cepat ke Indonesia setelah kagum dengan kereta cepat buatan Tiongkok dalam kunjunganya disana pada 9 November 2014. [[3]](#footnote-3)

Dalam mewujudkan pembangunan kereta cepat, ada dua investor yang sangat berminat dalam mewujudkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu, yaitu Tiongkok dan Jepang. Namun sedari awal, pemerintah tidak merestui sepeser pun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membiayai proyek itu. Bahkan dengan tegas pemerintah juga mengatakan tak akan memberikan jaminan finansial. Tiongkok, Jepang dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan. Di satu sisi Tiongkok dan Jepang ingin memperkuat pengaruh ekonomi politiknya di Asia, di sisi yang lain, Indonesia membutuhkan “dana segar” untuk mendukung program pemerintah dalam membangun infrastruktur (dalam kasus ini adalah Kereta Cepat).

Indonesia dihadapkan pada dua pilihan, menerima proposal dari Tiongkok atau Jepang. Jepang memiliki kemampuan yang lebih baik ketimbang Tiongkok dalam mengerjakan proyek kereta cepat tersebut. Jepang dikenal sebagai negara pelopor kereta cepat di dunia.Shinkansen pertama kali dibuka pada 1 Oktober 1964 untuk menyambut Olimpiade Tokyo. Dengan kata lain sudah 50 tahun lebih Jepang melakukan proyek kereta cepat di negaranya. Berbeda dengan Tiongkok yang baru memulai pembangunan kereta cepat pada tahun 1994 dan mulai masuk ke kereta api dengan kecepatan 250 kilometer per jam pada 1999. Dengan semua alasan yang ada seharusnya mengarahkan Indonesia untuk menjatuhkan pilihannya kepada Jepang bukan Tiongkok. Namun, Indonesia akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Tiongkok.[[4]](#footnote-4)

Perbedaan *review* jurnal ini dengan penelitian yang peneliti bahas yaitu jurnal ini membahas bagaimana kebijakan pemerintahan Indonesia dalam memilih untuk bekerjasama dalam pembangunan kereta cepat Jakarta bandung dimana Indonesia dihadapkan oleh dua investor yaitu China dan Jepang. Dan alasan Indonesia lebih memilih Tiongkok sebagai penyelenggara investasi dalam kereta cepat dari pada jepang yang dikarenakan investasi ini dengan tiongkok ini tidak menyentuh dana APBN sedangkan dengan Jepang harus menaruh uang yang berasal dari APBN. Sedangkan, penelitian skripsi penulis ini membahas bagaimana bentuk kerjasama investasi antara Indonesia dan Tiongkok. Persamaannya adalah fokus pada pembangunan infrastruktur merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi dan sebelum terjadinya kerjasama anatara Indonesia dengan Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat ini, Indonesia harus memilih antara Jepang dan Tiongkok dan ternyata Indonesia lebih memilih Tiongkok dari pada Jepang.

1. “Realisasi Investasi Infrastruktur Tiongkok di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia”. Literatur *review* ketiga adalah Skripsi yang di tulis oleh Pebriansyah Wanafi, S. Ip dari Universitas Pasundan. Skripsi ini membahas Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan dana besar untuk melakukan pembangunan dan perbaikan pembanguan yang telah tercapai sebelumnya. Akan tetapi pembangunan memerlukan dana yang sangat besar guna tercapainya pembangunan tersebut, karenanya kebijakan pemerintahan Indonesia berusaha agar dapat mengumpulkan dana yang bisa digunakan membiayai pembangunan, agar tercapainya pemulihan ekonomi, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penyerapan dana melalui investasi asing maupun dalam negeri.

Dana dari luar negeri atau investasi asing sangatlah membantu dalam mencapai pembanguan suatu negara, jika suatu pembanguan memerlukan dana yang besar dan negara tersebut tidak memiliki dana maka investasi asing dapat di lakukan. Investasi asing berdampak postif terhadap kemajuan perekonomian suatu negara, karena dari investasi asing menbawa efek domino yang berupa *transfer of technology*, investasi asing bukan hanya mengatasi kekurangan dana pembanguan tetapi mengefesiensikan pembangunan. Tiongkok adalah salah satu negara investor dalam pendanaan proyek-proyek pembanguan di Indonesia, yang menjadi fokus dari pendanaan proyek yang didanai Tiongkok adalah proyek infrastrukutur seperti pembanguan Bandara, Kereta Cepat, Jalan Raya, Bendungan, Pelabuhan dan pengembangan suatu kawasan seperti perumahan dan sebagainya. Pembanguan infrastruktur membuka peluang untuk Tiongkok mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan sosial politik serta hukum. Investasi Tiongkok juga akan menciptakan perubahan dalam beberpa hal seperti :

1. Perbaikan kebijakan public yang tanggap terhadap rakyat miskin dan perbaikan tata pemerintahan.
2. Perbaikan prioritas seperti Perbaikan tatacara promosi dalam menarik investasi secara professional, yang di barengi perubahan sistem perdagangan luar dan dalam negeri, membangun pasar keuangan yang bersaing, mendorong persaingan swasta.
3. Membangun sistem pelayanan pemerintah terhadap investasi yang lebih mudah.

Tiongkok dalam praktek pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia selalu menerapkan peraturan yang menguntungkan Tiongkok, seperti tenaga pelaksana teknis proyek bisanya berasal dari warga negara Tiongkok termasuk untuk tenaga analisis dan kemitraan strategis, dan hanya menggunakan sedikit sumber daya manusia lokal. Hal tersebut diterapkan pemerintah Tiongkok untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan kedua belah pihak seperti kebocoran dana dalam pelaksanaan teknis pembanguan proyek-proyek yang di biayai Tiongkok. Pembangunan infrastruktur yang di biaya oleh Tiongkok dapat meningkatkan mobilitas perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi naik.[[5]](#footnote-5)

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah dimana skripsi ini hanya membahas pada kerjasama investasi Indonesia dengan Tiongkok dalam seluruh pembangunan infrastruktur di Indonesia sedangkan, penelitian ini lebih berfokus pada pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Persamaannya adalah penelitian ini membahas alasan Indonesia bekerjasama investasi dengan Tiongkok dan fokus Indonesia untuk mengembangkan pembangunan infrastrukturnya agar bisa mengembangkan perekonomian.

1. **Kerangka Teoritis**

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang di gunakan untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu sebagai tolak ukur atau pembanding dalam menganalisa masalah penelitian. Dalam peneltian ini, penulis menggunakan Teori Hubungan Bilateral, Teori Liberal, Teori Kerjasama Internasional, Konsep Investasi, dan Teori Interdependensi, Teori Kepentingan Nasional.

Teori Hubungan Internasional istilah ‘hubungan internasional’ itu sendiri berarti bahwa apa yang kita kaji hanyalah hubungan antar Negara di dunia, yang pada hakikatnya hubungan antar negara-bangsa. Focus kajian HI saat ini semakin meluas yang juga memperhatikan keberagaman definisi teori dan menjelaskan megapa sejumlah orang berargumen bahwa ‘politik Internasional’ merupakan deskripsi yang lebih tepat. Dibawah ini ditampalikan sejumlah fokus kajian disiplin ilmu HI saat ini:

“*hubungan* – saling ketergantungan (interdependensi) ekonomi, hutang dan ketergantungan Dunia Ketiga, perdagangan Internasional, ketidaksetaraan, identitas politik dan kewarganegaraan model baru, rezim, komunitas negara-negara unternasional, anarki, kerjasama ekonomi regional, keseimbangan kekuasaan, demokratisasi, keamanan pasca Perang Dingin;

“*aktor – negara – bangsa*, perusahaan transnasional, pasar modal, organisasi non-pemerintah, masyrakat politik supra-nasional dan sub-nasional, pasukan penjaga perdamaian PBB, gerakan sosial baru, G7,IMF-Bank Dunia;

“*isu-isu empiris* – globalisasi dan isolasi, hak asasi manusia, interverensi dan kedaulatan, bantuan, pengungsi, etnis, persoalan perempuan, konservasi lingkungan, aids, narkoba, kejahatan terorganisir;

“*isu-isu filsafat* – permasalahan epistemology, ontology, dan metodologi, perspektif gender, perdebatan antar paradigma, etika dan kebijakan luar negeri.”

Menurut **Halliday**, bahwa :

**“Hubungan Internasional memiliki pokok bahasan yang berbeda-beda, dapat diidentifikasi tiga ‘elemen pokok’ yang telah menghasilkan beragam sub bidang spesialisasi, kajian interdisipliner dan pendekatan teoritis. Elemen-elemen terserbut adalah 1. Antar-negara; 2. Transnasional; dan 3. Sistem.”[[6]](#footnote-6)**

**“Hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang melibatkan sejumlah besar fakta tentang dunia. Tetapi seperti telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta ini hanya akan menjadi lebih bermakna dan relevan ketika tersedia suatu kerangka berpikir (teori) sebagai tempat bagi fakta-fakta tersebut untuk dideskripsikan, dianalisis dan bahkan memperhitungkan sesuatu yang akan terjadi ke depan.”**

**Bull** mengemukakan bahwa :

**“Teori hubungan internasional bisa dipahami sebagai sekumpulan proposisi-proposisi umum yang dikemukakan mengenai politik global/dunia (*world politics*). Proposisi tersebut mencakup proposisi-proposisi normatif, yang menyatakan konsiderasi-konsiderasi moral ataupun legal yang dapat diaplikasikan dan juga proposisi-proposisi positif yang mendefenisikan atau menjelaskan karakter aktualnya.”**

**“Teori hubungan internasional meliputi teori-teori komprehensif yang mendeskripsikan atau menentukan politik internasional secara keseluruhan, tetapi juga teori-teori parsial yang hirau dengan beberapa elemen politik internasional semisal perang atau damai, strategi atau diplomasi.”**

**“Teori hubungan internasional juga meliputi teori tentang masyarakat internasional atau sistem internasional yang membahas mengenai hubungan berbagai unit (negara-negara, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok supranasional, transnasional dan subnasional) yang membentuk politik global/dunia (*world politics*), termasuk juga teori mengenai unit-unit itu sendiri.”**

Teori hubungan internasional meliputi juga teori-teori yang dikembangkan secara sadar untuk meniru metode ilmu-ilmu alam, yang artinya menolak apa saja yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis atau tidak dapat diverifikasi secara ketat melalui prosedur-prosedur empiris; dan juga tentu saja teori-teori yang dikembangkan tanpa mengikuti persyaratan metodologis di atas.[[7]](#footnote-7)

**Konsep Hubungan Bilateral** Hubungan Internasional yang membahas hubungan kerjasama antar negaramerupakan pertemuan beragam kepentingan internasional dari beberapa negara yangsifatnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri. Menurut **T. May. Rudy :**

**“Setelah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan.”**

Definisi kerjasama menurut **Holsti** dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

**“1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi oleh semua pihak.**

**2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.**

**3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.**

**4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.**

**5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka.”**

Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negaramemiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional. Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Menurut **Perwita dan Yani** :

**“Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara.”**

Dalam proses Hubungan bilateral di tentukan tiga motif, yaitu: • Memelihara kepentingan nasional • Memelihara perdamaian • Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok yang secara historis telah berlangsung lama memperlihatkan kerjasama dan kepentingan yang sangat kuat, utamanya asimilasi budaya dan perkembangan ekonomi yang sangat terlihat dalam kelompok-kelompok masyarakat di kedua negara. Kerjasama bilateral Indonesia dan Tiongkok merupakan suatu hubungan diplomatik yang bersifat idealis dan kompetitif. Banyak hal yang menguntungkan dari kerjasama ini, akan menciptakan suatu hubungan bilateral yang dinamis, bersama dengan persaingan produk Tiongkok yang menyebar di pasaran Indonesia, membuat komoditi pasar Indonesia pun, harus segera dapat menyeimbangkan pendapatan distribusi penyebaran produk Tiongkok, yang telah menduduki pasaran tingkat atas pada sistem distribusian. Namun dibalik persaingan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, kedua negara ini banyak membangun diplomasi di bidang lain, selain di bidang ekonomi, Indonesia dan Tiongkok terlibat dalam G-20, dan termasuk dalam ASEAN plus 3, dan Organisasi Perdagangan WTO.

Hal ini membuktikan, bahwa Indonesia dan Tiongkok masih memiliki hubunganyang berkesinambungan dalam hal kerjasama politik, yang dimana hubungan ini masih sangat diperlukan untuk saling mendukung dalam upaya meningkatkan dukungan intensitas kepercayaan internasional. Banyaknya produk Tiongkok yang menyebar di Indonesia, dikarenakan keahlian para pengusaha dari Tiongkok, yang mampu membaca situasi pasar Indonesia, yang sangat kurang dalam mengembangkan industri kecilnya, yang dinilai sangat berpotensi menjadi salah satu pengembangan hegemoni baru, untuk menghasilkan komoditi yang cukup bagus bagi ekspor di luar negeri.[[8]](#footnote-8)

**Teori Liberal** Asumsi dasar pendekatan liberalisme ekonomi. Secara teori, sesuai yang diutarakan oleh **Scott Burchill:**

**“Liberalisme pada dasarnya memuat asumsi dasar nilai-nilai sebagai berikut, yaitu: mengunggulkan paham kebebasan individual, kebutuhan membentuk institusi untuk mengakomodasi beragam kepentingan individual supaya tidak saling berkonflik, individual mesti bebas dari intervensi pemerintah, mendukung opsi pasar kapitalisme sebagai cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan.”**

Liberalisme ekonomi merupakan suatu sistem ekonomi dimana kekayaan produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi. Tujuan dari kepemilikan pribadi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan efisiensi dari penggunaan kekayaan yang produktif. Nilai liberalisme dalam perekononomian adalah perdagangan bebas, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Namun, itu hanyalah teori. Pada kenyataannya tidak ada satu negarapun di dunia yang secara murni menerapkan perdagangan bebas. Akan selalu ada campur tangan negara melalui kebijakan fiskal.

Liberalisme ekonomi menilai bahwa campur tangan pemerintah hanya akan menyebabkan terjadinya distorsi pasar yang pada akhirnya mengakibatkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Adanya intervensi pemerintah paling tidak akan merugikan kepentingan slah satu diantara dua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keadilan dalam kehidupan ekonomi sangat ditentukan oleh hilangnya campur tangan pemerintah secara total. Lembaga sosial atau identik dengan institusi yang paling diutamakan adalah pasar. Yang terpenting dalam ekonomi liberal adalah mekanisme pasar. Karena itu, mereka yang memiliki modal dan melibatkan diri dalam kegiatan pasar akan menentukan apa yang akan terjadi dalam proses ekonomi. Sementara itu ekonomi liberal memandang peran negara adalah untuk melindungi hak milik dan menciptakan lingkungan yang mendukung bekerjanya pasar. Ideologi yang mendasari ilmu ekonomi liberal memiliki asumsi khas tentang hakekat manusia. Yaitu manusia dipandang semata-mata sebagai “makhluk ekonomi” yang tentu saja selalu ingin memaksimalkan keuntungan.

Teori yang dikembangkan oleh **Adam Smith** sangat dipengaruhi oleh paham individualisme yang menjadi salah satu pilar dari liberalisme. Dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations*, **Adam Smith** memandang manusia sebagai makhluk yang rakus, egois, dan selalu ingin mementingkan dirinya sendiri. Berdasarkan keyakinan ini, liberalisme menganggap bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu bersifat tidak terbatas dan tidak akan pernah puas. Ada empat gagasan pokok dalam Liberalisme:

1. Diakuinya hak milik perorangan secara luas bahkan hamper tanpa batas.
2. Pada semua individu diakui adanya motif ekonomi yang mengejar keuntungan maksimal.
3. Adanya kebebasan untuk berkompetisi antarindividu.
4. Adanya mekanisme pasar yang mengatur persaingan dan kebebasan tersebut.

Mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan terjadi spontan dan alami, tanpa campur tangan pemerintah *(the principel of invisible hands).* Ada beberapa yang akan didapatkan suatu negara bila menerapkan sistem ekonomi liberal, antara lain: menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.[[9]](#footnote-9)

**Teori Kerjasama Internasional** Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Menurut **Dougherty & Pfaltzgraff** kerjasama adalah :

**“Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.”**

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.

2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.

3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Menurut Kartasasmita, Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

1. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.

2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.

3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.

4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.[[10]](#footnote-10)

**Konsep Investasi** menurut **Eni Setyowati dan Siti Fatimah N**, Investasi merupakan :

**“Salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stok kapital.”**

Menurut **Sunariyah**, Investasi adalah :

**“Penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”**

Investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktiktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat. Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

1. Teori **Neo Klasik** menekankan :

**“Pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.”**

Tokoh Neo Klasisk, ***Sollow* dan *Swan***memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

1. Teori **Harrod-Domar**:

***“*Mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.**

Teori **Harrod-Domar** memandang bahwa :

**“Pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemapuan utnuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar.”**

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

1. Investasi portofolio (*portfolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

2. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata, berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.[[11]](#footnote-11)

**Teori Interdependensi** pada dasarnya setiap negara saling ketergantungan. Dimana untuk memenuhi kepentingan nasionalnya membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Interdependensi merupakan saling ketergantungan yang mempertemukan kekurangan dari masing-masing negara melalui keunggulan komparatif masyarakat.Menurut **Robert O. keohane dan Joseph S. Nye :**

**“Aktor transnasional menjadi semakin penting, kekuatan militer tidak absolut dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dalam suatu negara”[[12]](#footnote-12)**

Interdependensi dapat terjadi di berbagai isu, seperti ekonomi dan politik seperti perdagangan, investasi dan finansial. Transaksi perdagangan memiliki implikasi yang besar terhadap interdependensi yang berupa informasi antar pemerintah. Akan menjadi mutual dependent antar negara dalam hal barang dan jasa yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Interdependensi akan sangat merugikan jiga diputuskan hubungannya. Sektor investasi semakin tingginya kenaikan resiko bagi para aktor interdependensi akan mengalami kecenderungan yang disebabkan oleh berubahnya pola investasi. Sedangkan dalam sektor politik terdapat suatu kesadaran bahwa kelangsungan hidupnya secara sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Kerjasama antar negara tersebutlah yang akan dapat saling melengkapi kekurangan dari masing- masing negara.

Dalam interdependensi keberhasilan suatu negara dalam bekerjasama bertumpu pada dua hal, yaitu power dan kempuan tawar menawar dan rezim internasional. Power dan kemampuan tawar menawar berkaitan dengan kondisi interdependensi yang tidak sejalan atau asimetris, karena dalam teorinya hubungan interdependensi lebih mengarah kepada hubungan timbal balik, namun pada kenyatannya hubungan yang sejalan atau simetris tersebut jarang terjadi. Kemudian, rezim internasional bertumpu pada hubungan saling ketergantungan yang tidak sejalan atau asimetris yang menyediakan setiap pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonomi politiknya dalam mencapai kesepakatan diantara mereka.[[13]](#footnote-13)

**Konsep Kepentingan Nasional** dalam hubungan internasional maupun studinya, terdapat elemen yang berkontribusi dalam perkembangannya. Elemen tersebut antara lain adalah *actor*, *interest*, dan *power*. Ketiga hal tersebut berkorelasi dengan satu sama lain dalam membentuk suatu identitas negara. Sebelum sebuah negara dapat mewujudkan suatu identitas, maka setiap elemen tersebut perlu dikembangkan satu persatu. Dimulai dari aktor, aktor adalah pelaku penggerak terjadinya suatu hubungan diplomasi antar negara. Namun perlu diketahui, setiap tindakan yang dilakukan oleh aktor dilatar belakangi suatu tujuan, dan tujuan tersebut mengarah pada terciptanya kepentingan nasional. Adapun fungsi dari *national interest* itu sendiri adalah sebagai panduan bagi para pemimpin dalam melakukan hubungan luar negeri dan patokan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melakukan hubungan luar negeri. Pencetus pertama pengertian kepentingan nasional yaitu **Hans J Morgenthau** ia berpendapat bahwa:

**“Kepentingan nasional  merupakan alat untuk mengejar kekuasaan, karena melalui kekuasaan itulah suatu negara dapat mengontrol negara lain. Lebih spesifiknya konsep kepentingan nasional adalah kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain”**

Selain Morgenthau, **Felix E. Oppenheim (1987**) mengartikan :

**“Konsep kepentingan nasional adalah tujuan kesejahteraan pemerintahan nasional dalam level internasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepentingan nasional dari suatu negara adalah untuk menjaga otonomi politik dan integrasi nasionalnya demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakatnya sampai ke tahap internasional. Secara garis besar kepentingan nasional adalah tujuan, cita-cita dan harapan yang ingin dicapai oleh suatu negara.”**

Untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara menetapkan kebijakan-kebijakan luar negeri untuk mengatur negara agar lebih terarah dalam mengadakan suatu hubungan internasional. Kepentingan nasional secara tidak langsung juga berfungsi sebagai akses suatu negara untuk melihat fenomena-fenomena antar batas lintas negara. Aktivitas negara dalam hubungan internsional juga perlu diperhatikan karena setiap tindakan yang dilakukan harus melihat kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Karena kepentingan nasional mempengaruhi suatu negara untuk mengambil keputusan dalam menjalin suatu hubungan internasional. Kepentingan nasional dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan kepentingannya, sifatnya dan cakupannya.[[14]](#footnote-14) Dalam pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu meningkatkan perekonomian di Indonesia maka dari itu Indonesia membutuhkan pengembangan pembangunannya dan saat ini sedang dilakukan pembangunan dalam sektor transportasi dikawasan Jakarta-Bandung karena perkembangan pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan setiap negara.

1. **Hipotesis Penelitian**

* Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, menimbulkan hipotesis penelitian bahwa: ***“jika investasi China dalam pengembangan kereta cepat di Indonesia dapat terealisasikan maka berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian baru di Indonesia yang di tandai dengan adanya Transit Oriented Development (TOD) untuk mendorong sentra ekonomi baru.”***

1. **Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teorotik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas :**  Kerjasama Investasi Indonesia dengan Tiongkok dalam Pembangungan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia | 1. Adanya persetujuan kerjasama (MoU) antara Indonesia dengan Tiongkok. Proses pemulihan ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MOU) oleh kedua menteri luar negeri, Ali Alatas dan Qian Qichen, di Istana Negara pada 8 Agustus 1990, dan disaksikan oleh kedua kepala negara, Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng. 2. Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyepakati kerja sama pada delapan bidang. ada delapan MoU yang ditandatangani, yakni nota kesepahaman kerja sama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT, Nota kesepahaman kerja sama Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT, dan Nota Kesepahaman kerja sama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT. Pada 26 maret 2015 dilaksanakan di Great Hall of The People oleh para pejabat Indonesia dan Tiongkok dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Xi Jinping. 3. Adanya penandatanganan kerjasama perjanjian konsesi atau perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan perekretaapian umum kereta cepat Jakarta-Bandung antara PT KCIC dengan Kementerian Perhubungan. PT KCIC sendiri telah mendapatkan penetapan trase jalur kereta cepat antara Jakarta dan Bandung lintas Halim-Tegal Luar pada tanggal 12 Januari 2016 dan penetapan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai badan usaha penyelenggara prasarana kereta api cepat antara Jakarta dan Bandung pada tanggal 15 Januari 2016 dari menteri perhubungan serta izin lingkungan kegiatan pembangunan jalan kereta cepat sepanjang Jakarta-Bandung sekitar lebih kurang 142,3 Km pada tanggal 20 Januari 2016 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tanggal 21 Januari 2016 PT KCIC juga telah melakukan *ground Breaking* oleh Presiden Joko Widodo, kemudian pada tanggal 16 Maret 2016 PT KCIC telah menandatangani perjanjian konsesi atau perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan perekretaapian umum kereta cepat Jakarta-Bandung antara PT KCIC dengan Kementerian Perhubungan. | 1. <http://e-journal.uajy.ac.id/680/2/1EP16282> 2. <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/22510981/Indonesia-Tiongkok.Sepakati.Kerja.Sama.di.Delapan.Bidang>. 3. Sumber: Wika (PT. Wijaya Karya (persero) Tbk). Keterbukaan Informasi, Jakarta, 22 Maret 2016 |
| **Variabel Terikat :**  Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. | * Terbentuknya kawasan dan pusat perekonomian baru di beberapa wilayah. Akan di bandung Transit Oriented Development (TOD) untuk mendorong sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung. Seperti di Walini akan di bangun kota baru walini, di Karawang juga akan menjadi pusat perekonomian baru, di tegal luar akan menjadi pusat industry atau inovasi. * Di bangunnya 4 stasiun yang melewat jalur Jakarta-Bandung, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini dan Stasiun Tegal luar. * Adanya 288 pengusaha kantin penyedia makanan higenis dalam proses konstruksi trase KCJB. * Terbukanya peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar KCJB. * Memberikan 45 beasiswa (akses pendidikan) berkualitas baik bagi sekolah dan pelajar di sekitar di sekitar proyek KCJB | 1. Kementrian BUMN, www.voaindonesia.com/amp/3177970.html |

1. **Skema Kerangka Konseptual**

Alur Pemikiran Penelitian

“Kerjasama Investasi Indonesia – Tiongkok dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung di Indonesia”

**INDONESIA**

**PEMBANGUNAN TRANSPORTASI TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BARU DI INDONESIA**

**KERJASAMA KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG**

**KERJASAMA INVESTASI**

**TIONGKOK**

**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

1. Era Jokowi, Indonesia-Cina Makin Mesra, Detikfinance, 13 April 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Model Pembiayaan Infrastruktur:Indonesia dan Negara Lain, Biro Riset BUMN, Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM-FEB UI, 2016) [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/05/150747626/Darimana.Pinjaman.Miliaran.Dollar.untuk.Proyek.KA>. Diakses pada 15 April 2018 [↑](#footnote-ref-3)
4. “Jepang Bingung engapa Indonesia emilih hinkansen Tiongkok”.*Tribun Internasional.*24 September 2015. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/09/24/jepang-bingung-mengapa-indonesia-memilih-shinkansen-Tiongkok> diakses pada tanggal 15 April 2018 [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3153572/meningkat-26-realisasi-investasi-china-di-2015-lampaui-rata-rata-5-tahun> 15 April 2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. Scott Burchill, “*Teori-teori Hubungan Internasional*” Penerbit Nusa Media (Bandung), 2008, hal 10. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vinsensio Dugis, dalam “<https://www.researchgate.net/profile/Vinsensio_Dugis/publication/321709080_Teori_Hubungan_Internasional_Perspektif-Perspektif_Klasik/links/5a2c36a00f7e9b63e53adfed/Teori-Hubungan-Internasional-Perspektif-Perspektif-Klasik.pdf>” diakses pada 9 april 2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. http://www.kemenperin.go.id/artikel/3817/Lalai-Dampak-Buruk-ACFTA,-Indonesia-

   Kebanjiran-Produk-China diakses pada 10 April 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid. hal 15* [↑](#footnote-ref-9)
10. elib.unikom.ac.id/files/disk1/329/jbptunikompp-gdl-vithasyawo-16408-3-9-bab-b.pdf diakses pada 10 april 2018. [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://digilib.unila.ac.id/4528/15/BAB%20II.pdf> diakses pada 10 april 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. “*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*”. Bandung. PT. Remaja Rosdakaya. [↑](#footnote-ref-12)
13. Yanuar, Ikbar. 2006. *“Ekonomi Politik Internasional Konsep dan Teori”.* Bandung. PT Refika Aditama. [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://ronapea-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-165107-JURNAL%20SOH%20101-KONSEP%20KEPENTINGAN%20NASIONAL%20DALAM%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL.html> diakses pada 13 juni 2018 [↑](#footnote-ref-14)